

# Pendidikan Agama Islam Indonesia sebagai Subsistem Pendidikan Nasional

MASTUHU

Guru Besar UIN Syahid Jakarta

*It is necessary for Islamic educational institutions to have the power of changing themselves to be able to take part in determining the ideal and success of national education. Precisely, today, Islamic educational system is perceived weak and powerless in the dynamic of social changes have been occurring in the society. Even, this situation, it is frequently assumed as the burden of national education. Why can it be so? Aren't Islamic educational providers are also referring to the only one Law, that is, Law Number 20 year 2003 regarding National Educational System? What is wrong with Islamic education? How is the quality of human resources of these providers? This article tries to answer those questions. This article also deals with analogue of Islamic Education as a subsystem of national education with family system in Islam. Family is a system. Child is a subsystem of the family. The more the child is matured and independent the better his/her family is.*

## Pendahuluan

Dalam satu negara hanya ada satu Sistem Pendidikan Nasional (SPN), yang untuk Indonesia, hal itu dituangkan dalam UU SPN No. 20 th. 2003. Oleh karena itu, semua usaha menyelenggarakan pendidikan yang dilakukan oleh warga

negara dimana pun, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, merupakan subsistem dari SPN dimaksud. Bahkan perguruan-perguruan yang diselenggarakan oleh pemerintah juga merupakan subsistem dari SPN, jadi Pendidikan agama Islam Indonesia merupakan subsistem dari SPN.

Sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerjasama secara terpadu, dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah menjadi cita-cita bersama para pelakunya. Kerjasama antara para pelaku ini didasari, dijiwai, digerakkan, digairahkan, dan diarahkan oleh nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh mereka. Unsur-unsur suatu sistem pendidikan selain terdiri atas para pelaku yang merupakan unsur *organik* (hidup), juga terdiri atas unsur-unsur *anorganik* (materi) lainnya berupa, dana, sarana, dan alat-alat pendidikan lainnya baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Hubungan antara nilai-nilai dan unsur-unsur dalam suatu sistem pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain, bagaikan “gula dengan manisnya” tidak ada gula yang tidak manis, semua gula adalah manis. Namun tidak semua yang manis adalah gula. Banyak buah-buahan manis, namun tidak disebut gula. (Mastuhu, 1994: 6).

Pendidikan Islam Indonesia, sebagai Subsistem Pendidikan Nasional (SPN), ia harus berposisi dan berperan jelas sehingga ia mampu ikut serta menentukan

keberhasilan pendidikan nasional dalam mencapai cita-citanya. Namun peran dimaksud hanya dapat dilakukan jika pendidikan Islam Indonesia mempunyai kekuatan, makin berdaya sistem Pendidikan Islam Indonesia, makin besar sumbangannya untuk memberdayakan Sistem Pendidikan Nasional (SPN), sebaliknya jika sistem pendidikan Islam Indonesia lemah dan tidak berdaya, hal itu hanya akan menjadi beban Pendidikan Nasional.

Dalam pada itu, gejala di lapangan menunjukkan bahwa secara kuantitatif jumlah perguruan-perguruan Islam swasta lengkap dengan siswanya sangat banyak karena mayoritas penduduk negeri ini adalah umat Islam. Mereka bermutu rendah dan kurang mampu ikut serta menentukan keberhasilan Pendidikan Nasional, bahkan terkesan marjinal. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah “mengapa”?

### Analisa

Melihat lebih dekat pendidikan Islam Indonesia, problematikanya dapat kita golongkan ke dalam dua sebab a). *Internal* dan b). *Eksternal*

### a. Internal.

Penyelenggaraan perguruan Islam “tenggelam” dan “hanyut” ke dalam Sistem Pendidikan Nasional (SPN), yang dalam hal ini hanyut dalam sistem perguruan-perguruan atau sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Seiring dengan ini semua perguruan-perguruan yang diselenggarakan oleh swasta “berhadapan” atau “bersaing” dengan sekolah-sekolah negeri, pada umumnya sekolah-sekolah swasta menang dalam jumlah, tetapi kalah dalam mutu. Pihak swasta merasa senang dan bahkan bangga jika sekolahnya, diakui apalagi disamakan dengan perguruan negeri, dan siswanya dapat diterima di perguruan-perguruan tinggi negeri, seperti Universitas Indonesia (UI), UGM, ITB (Bandung), IPB (Bogor), UIN Jakarta, dan sebagainya. Bahkan banyak madrasah-madrasah yang bangga jika dapat dinegerikan.

Tentu saja sekolah-sekolah negeri *menang* bersaing dengan sekolah-sekolah swasta, karena otorita (kekuasaan), dana, sarana, berbagai fasilitas pendidikan lebih banyak dan lebih hebat dimiliki oleh sekolah-sekolah negeri daripada dimiliki oleh sekolah-sekolah swasta. Demikian

pula halnya dengan ijazah-ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah negeri lebih kuat atau lebih menentukan untuk melanjutkan studi ke tingkat perguruan yang lebih tinggi dan lebih kuat pula sebagai syarat untuk memasuki dunia kerja, dibandingkan dengan ijazah-ijazah dari sekolah swasta. Tentu saja ada satu-dua pengecualian di mana perguruan swasta memiliki kekuatan yang hebat yang dapat mengalahkan sekolah-sekolah negeri. Sekolah-sekolah swasta yang demikian ini merupakan sekolah-sekolah elit dan mahal, dan pada umumnya diselenggarakan oleh kelompok lain di luar perguruan yang diselenggarakan oleh umat Islam. Mengapa dapat terjadi hal yang demikian itu? Bukankah mereka juga merujuk pada satu undang-undang yang sama yaitu UU SPN No. 20 th. 2003? Apa yang salah dengan ajaran Islam? Jelas tidak ada kesalahan dalam ajaran Islam. Kalau begitu SDMnya? Besar kemungkinan di sini letak kesalahannya, tetapi siapa-siapa yang sebenarnya tampil di berbagai jabatan yang banyak memiliki peluang untuk melaksanakan UU SPN No. 20 th. 2003 dengan benar, kreatif dan arif? Disadari sepenuhnya? Kita tidak dapat menjadikan umat sebagai “kambing hitam” dengan menyata-

kan umat belum siap, belum cerdas, dan miskin. Justru pendidikan dalam Indonesia harus mampu mengentaskan mereka. Masalahnya jangan dikembalikan kegelongan “akar rumput” atau rakyat kecil, mereka ini menunggu dengan setiap dan siap mengikuti pemimpinnya (*like leader, like people*), bagaimana pemimpinnya begitulah rakyatnya karena rakyat hanya mengerjakan apa yang mereka lihat. Maksudnya, rakyat melihat penampilan pemimpinnya. (Maxwell, 1982: 120-142).

Peraturan perundang-undangan yang kita miliki terutama UU SPN No. 20 Tahun 2003 sudah cukup terbuka, demokrasi, dan menyediakan peluang yang cukup lebar bagi Sistem Pendidikan Islam Indonesia, dan juga bagi subsistem-subsistem pendidikan lain untuk berkiprah mengembangkan jati dirinya sehingga mampu ikut serta membangun Pendidikan Nasional secara berarti atau signifikan, termasuk membesarkan dirinya sendiri. Tidak diingkari boleh jadi UU SPN No. 20 Tahun 2003 juga memiliki kekurangan, namun secara *legalistik-formalistik* dan normatif perangkat perundang-undangan tersebut sudah cukup memadai untuk membangun dan membesarkan Pendidikan Islam Indonesia lengkap dengan per-

guruan-perguruannya. Ajaran-ajaran Islam, Pancasila, nilai-nilai sosial-budaya bangsa, dan sebagainya memiliki kebenaran-kebenaran kemanusiaan universal, dan sumber-sumber kekayaan alampun sangat kaya tersimpan dalam kandungan bumi pertiwi. Jadi hal itu sangat tergantung pada bagaimana kita para pengelola Pendidikan Islam Indonesia mensiasati, memanfaatkan dan mengembangkannya.

Dalam konteks analisa *Internal* seperti di atas kiranya dengan rendah hati kita masih dapat membenarkan kritik dari Prof. Tashiko Kinoshita, guru besar dari Universitas Waseda, salah satu Universitas terkemuka di Jepang, dalam kedudukannya sebagai salah satu anggota tim penasehat ahli yang diperbantukan oleh pemerintah Jepang kepada Presiden Megawati Soekarno Putri, mengatakan bahwa: “*Masyarakat Indonesia tidak pernah berpikir panjang, masyarakat Indonesia hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berpikir panjang. Hal ini menyebabkan Indonesia akan sulit bersaing dengan Cina dan negara-negara Asia lain dalam percaturan ekonomi dan perdagangan global. Karakteristik seperti ini bukan hanya terlihat dikalangan masyarakat tertentu saja, tetapi terlibat diseluruh lapisan*

*masyarakat, juga dikalangan praktisi dan pejabat pemerintah*" (Kompas, 24 Mei 2002).

Selanjutnya mengapa Pendidikan Islam Indonesia terutama perguruan-perguruannya kurang berdaya dalam mengembangkan dirinya, dapat kita lihat antara lain dari hal-hal berikut:

**Pertama**, Umat Islam kurang rukun, kurang ideal sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam, khususnya dalam hal menyelenggarakan pendidikan.

Meskipun sudah banyak individu-individu di kalangan elit dan lapisan atas umat yang cerdas dan menyandang berbagai gelar sarjana keilmuan, memegang jabatan tinggi, dalam pemerintahan dan sebagainya, bahkan juga menyandang gelar-gelar keagamaan seperti "KH", "Ulama" dan sebagainya namun kenyataannya kehidupan umat sebagai kelompok mayoritas dari kehidupan nasional belum cerdas.

**Kedua**, banyak diantara mereka yang lebih *menghebatkan* diri sendiri, ketimbang *menghebatkan* kehidupan umat.

**Ketiga**, perguruan-perguruan Islam pada umumnya berdiri sendiri-sendiri sebagai milik pribadi, memang dibelakang setiap perguruan ada yayasan yang mem<sup>"back</sup>

*up*"nya, namun hal itu juga dikuasai oleh keluarga pendiri. Padahal institusi Pendidikan atau Perguruan, seyogyanya menjadi milik publik (umat).

**Keempat**, hanya sedikit sekali perguruan-perguruan Islam yang sudah "terbingkai" dalam suatu sistem dan bukan "terbingkai dalam milik pribadi namun hal itu masih dengan kuatnya merujuk sebagai milik golongan dan belum berada dalam bingkai Sistem Pendidikan Islam Indonesia sebagai milik umat, paling tidak kerjasama akademik antara berbagai perguruan Islam dalam suatu jaringan sistem belum terbangun atau belum *exist*.

**Kelima**, pendidikan Islam Indonesia, lengkap dengan perguruan-perguruannya, seperti madrasah dan pesantren hampir semuanya tampil dalam corak eksklusif belum inklusif. Padahal Islam adalah untuk kemaslahatan seluruh manusia, bahkan semua makhluk. Lebih banyak anak-anak dari keluarga muslim yang belajar di sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pihak Katholik atau Kristem Protestan, dan belajar di perguruan-perguruan umum lainnya, baik swasta maupun negeri, baik di dalam negeri maupun luar negeri, daripada anak-anak dari keluarga

nonmuslim yang belajar di perguruan-perguruan Islam. Hal ini boleh jadi karena mutu perguruan-perguruan Islam oleh mereka dianggap rendah dan dianggap tidak ada relevansinya dengan kebutuhan duniawiyah, atau karena mereka “takut” memasuki sekolah-sekolah Islam karena mereka menganggap perguruan-perguruan Islam hanya untuk anak-anak muslim, tidak untuk anak-anak non muslim.

**Keenam**, telah disadari sepenuhnya bahwa “*science and technology*” merupakan bagian essensial dalam ajaran Islam. Dalam Islam “tidak ada agama tanpa ilmu dan tidak ilmu tanpa agama”. Disamping itu adalah suatu kenyataan bahwa sains dan teknologi merupakan kata kunci untuk mengungkit atau membuka pembangunan kehidupan modern. Dunia dalam abad 21 ini tidak lagi dipetakan berdasarkan kekuatan ideologi politik, ada “Blok Barat”, “Blok Timur” atau “Blok Kapitalis-Liberalis”, dan ada “Blok Komunis-sosialis”, tetapi dipetakan berdasarkan kekuatan *science and technology*. Hanya negara-negara yang mampu menguasai sains dan teknologi maju dalam kenyataannya yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era globalisasi ini.

Bagaimana nasib negara Irak baru, penyelesaian, Palestina-Israel, penyelesaian hutang-piutang negara-negara maju lainnya yang menguasai sains dan teknologi.

Namun demikian sistem Pendidikan Islam lengkap perguruan-perguruannya tampak kurang semangat memberikan pendidikan sains dan teknologi. Anak-anak dari madrasah dan pesantren praktis hanya mampu memasuki perguruan-perguruan tinggi Islam, seperti Fakultas Tarbiyah, Ushuluddin, Adab, Syariah, dan Dakwah, nyaris tidak mampu memasuki fakultas-fakultas umum: Kedokteran, ekonomi, pertanian, sains dan teknologi dan sebagainya pada perguruan-perguruan tinggi; ITB, IPB, UI, UGM, dan sebagainya. Memang ada saja anak-anak dari madrasah dan pesantren yang mampu masuk keperguruan tinggi umum dimaksud tetapi hal itu terjadi karena usaha pribadi atau individual yang bersangkutan, bukan dari sistem Pendidikan Islam Indonesia. dengan kata lain, sesungguhnya belum ada satu kesatuan sistem yang berkesinambungan antara perguruan Islam madrasah dan pesantren dengan perguruan-perguruan tinggi tersebut di atas.

**Ketujuh**, paradigma keilmuan islami adalah tumbuh kembangnya sains dan teknologi dalam bingkai ajaran Islam. Sejak debat akademik tidak pernah bebas dari pembahasan *logos* dan *mitos*, maka dalam pandangan Islam adalah memasukkan *logos* dalam mitos Muhammad Saw. “Logos” berkenaan dengan “logika”, “rasio”, “akal”, ilmu dan teknologi”, sedang “mitos” berkenaan dengan mistis, tarekat, dan kekuatan-kekuatan gaib yaitu di luar kemampuan akal. Mitos hanya dapat dilihat dan dirasakan dalam ritual-ritual keagamaan, dalam upacara-upacara ibadah *mahdhah* seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya. Mitos juga paling rasional dan yang paling dapat dipertanggungjawabkan adalah mitos Muhammad Saw. Mitos di luar mitos Muhammad Saw. adalah ilmu-ilmu klenik yang justeru menyesatkan manusia. Misalnya, mitos mengenai *bintang-bintang* dilangit. Mitos bintang yang dimasukkan ke dalam ilmu *astrologi*, yang dipercaya bahwa “nasib manusia di dunia ini ditentukan oleh gerak peredaran bintang-bintang di langit. Sangat populer informasi yang menyatakan bahwa isteri mantan Presiden AS Nancy Reagan yang masih mengandalkan *astrologi* dalam mengatur berbagai langkah-

nya, bahkan boleh jadi juga langkah suaminya ketika menjadi Presiden Amerika Serikat (1981-1989). Ramalan jatuhnya Hitler, dan Saddam Husein konon sudah berada dalam ramalan *sawwam*. Muhammad Saw. memasukkan *astrologi* sebagai bagian dari *ilmu sibir*. Beliau bersabda “Barangsiapa yang mempelajari satu ilmu dari bintang-bintang (*astrologi*), maka ia telah mempelajari satu bagian dari sibir itu” (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah melalui Ibn Abbas).

Fungsi bintang menurut al-Qur’an: a. untuk hiasan langit, b. melontar setan, c. petunjuk arah bagi manusia, bukan untuk menentukan nasib manusia di dunia ini, (M. Quraish Shihab, 2005: 30-31).

*Madrasah* dan *Pesantren*, seharusnya menjadi salah satu lembaga yang merupakan mata rantai dari pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi dalam menumbuhkan-kembangkan sains dan teknologi dalam bimbingan wahyu Tuhan.

Oleh karena itu, akan sangat baik dan benar jika mayoritas anak-anak dari madrasah dan pesantren dapat melanjutkan studinya untuk mendalami berbagai sains dan teknologi diberbagai perguruan tinggi umum seperti dimaksud di muka. Hal ini hanya mungkin jika

Sistem Pendidikan Islam Indonesia, lengkap dengan perguruan-perguruannya berada secara *inklusif* dalam sistem pembelajaran nasional sejak dari; Dasar Menengah, sampai ke Perguruan Tinggi umum secara berkesinambungan. Kurikulum dan pembelajaran di Madrasah dan Pesantren harus relevan dengan persyaratan masuk ke berbagai fakultas-fakultas dan jurusan dari perguruan-perguruan Tinggi dimaksud. Hanya dengan demikian dapat diharapkan lahirnya sarjana-sarjana yang mampu mengembangkan dan mengamalkan sains dan teknologi dalam bimbingan wahyu (al-Quran).

#### b. Analisa eksternal

Meskipun UU SPN No. 20 Tahun 2003 sudah cukup memadai dengan memberikan peluang bagi pendidikan dan perguruan-perguruan Islam Indonesia (Madrasah dan Pesantren) untuk mengembangkan jati dirinya. Namun kenyataannya hal itu tidak menjadi kenyataan. Tampaknya ada kesalahan kebijaksanaan dalam praktek melaksanakan UU SPN tersebut. Perguruan-perguruan atau sekolah-sekolah negeri menjadi rujukan yang diikuti oleh pihak swasta dalam menyelenggarakan perguruan-

perguruannya. Perguruan-perguruan swasta sibuk berpikir dan bekerja mengikuti aturan-aturan dan cara-cara sekolah-sekolah negeri, seperti disebutkan di muka, padahal baik sekolah-sekolah negeri maupun swasta merupakan subsistem dari Pendidikan Nasional. Sebagai sesama sub SPN, mereka memiliki posisi dan peran yang sama-sama pentingnya, keduanya harus bekerjasama dalam saling ketergantungan, mereka berbeda dan mempunyai posisi serta peran masing-masing dalam SPN. Tetapi karena kekuatan yang sangat tidak seimbang maka jelas sistem tidak mampu berjalan atau berkerja sebagaimana seharusnya. Perguruan-perguruan swasta hanya berpikir dan bekerja bagaimana memahami persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah-sekolah negeri, kurikulumnya, metodologi pembelajarannya, persyaratan pengajarnya, ijazahnya, dan sebagainya. Sehingga mereka "lupa" dan "terbelenggu" mengembangkan jati dirinya. Mereka takut menyimpang dan takut tidak berkenan, sehingga kehilangan daya kreatif dan inovatifnya. Disamping itu karena SDM dan dana, mereka memang lemah dan kurang layak menyelenggarakan perguruan.

Kecuali itu, tampaknya kerja kependidikan masih dipandang atau diperlakukan sebagai kerja kantor-kantor perburuan atau kantor-kantor birokrasi pelayanan yang menekankan pentingnya produk *final* ketimbang produk proses (*being*) atau “menjadi” semakin canggih. Kerja kependidikan adalah kerja akademik yang menekankan tumbuh kembangnya pemikiran yang kreatif-inovatif dan moral yang semakin mantap yang selanjutnya hal ini akan membuka berbagai kemampuan meneliti untuk menghasilkan berbagai konsep, teori kompetensi, disain-disain pembangunan di berbagai pembangunan, sehingga perguruan-perguruan terutama perguruan tingginya—universitas riset—mampu menjadi *juru bicara* bangsa dan negara dalam menjawab berbagai masalah dan musibah yang dialaminya, baik masalah dan musibah alam maupun sebagai akibat kesalahan manusia.

Kerja akademik berorientasi pada mutu dan reputasi. Dalam organisasi kerjanya tidak mengenal hirarki otoritas yaitu “siapa memerintah siapa” tetapi hanya mengenal ketekunan dan semangat belajar. Oleh karena itu temuan-temuan baru sering muncul di tempat kecil dan terpencil serta

dalam suasana tenang dan non formal. Kerja akademik lebih mendahulukan kebenaran material daripada kebenaran struktural-formal. Seiring dengan ini kerja akademik lebih mendahulukan pendekatan strategis ketimbang mendahulukan pendidikan struktur organisasi lengkap dengan legal formalnya.

Suatu ilustrasi bagus yang dialami oleh salah seorang teman dosen dari ITB, Bandung; Suatu saat teman dosen tersebut mendapat telpon dari rekannya yang menjadi Dosen di Universitas Sam Ratu Langi, Manado. Teman dari Manado menggambarkan bahwa jurusan *teknik sipil* di Universitas Manado terancam bangkrut karena kekurangan Dosen, buku-buku, dan alat-alat laboratorium, jumlah mahasiswa yang terancam gagal studi ada 15 orang. Oleh karena itu ia mohon bantuan bagaimana mengatasi masalah tersebut.

Teman Dosen dari ITB, segera mengambil inisiatif dengan menanyakan kepada rekan-rekan dosen ITB dan di kalangan jurusan teknik sipil. Apakah mereka bersedia dititipkan tambahan memberi kuliah di kelas mereka masing-masing dengan beberapa mahasiswa dari jurusan yang sama (teknik sipil) dari

universitas Sam Ratu Langi, Manado. Ternyata mereka bersedia, mahasiswa dari jurusan teknik sipil dari "UNSRAM" dimaksud dipersilahkan datang ke Bandung dan mengikuti kuliah di ITB. Demikian seterusnya pendekatan kerjasama akademik tersebut dilakukan, tanpa didahului peresmian kerjasama antar lembaga, antar universitas Sam Ratu Langi, Manado dengan ITB, Bandung. Akhirnya setelah waktu seluruh perkuliahan cukup, mahasiswa menempuh ujian sebagaimana aturannya. Tetapi, bagi mahasiswa dari Universitas Manado tersebut, meskipun kuliah di ITB dan diuji di ITB, namun gelar "Ir" mereka tetap atas nama "Ir" fakultas sipil dari UNSRAM. Peresmian kerjasama antar dua lembaga pendidikan tinggi tersebut diurus belakangan.

Ada sepuluh (10) Butir Pemikiran yang menjadi kriteria baik-buruknya suatu lembaga pendidikan dan suatu unit sekolah yang merupakan aktualisasi atau perwujudan dari sistem Pendidikan, untuk selanjutnya dalam tulisan ini, terminologi "pendidikan" dan "perguruan", ditulis dalam satu kata yaitu "pendidikan".

***Pertama, Kejelasan Visi, Misi, Tujuan, Orientasi dan Strategi atau Pendekatan yang digunakan.***

***Visi.*** Visi Pendidikan Islam Indonesia (PII) adalah menyelamatkan dan mengembangkan potensi fitrah positifnya. Islam meyakini manusia diciptakan oleh Tuhan menurut fitrahnya, dalam fitrah itu terdapat potensi-potensi positif dan negatif. Jika pendidikan umat berhasil mengembangkan potensi positif maka berkembanglah sifat-sifat baik "ilahiyah" sebaliknya jika gagal yang akan berkembang adalah sifat-sifat buruk "syaitaniyah", bahkan boleh jadi melebihi sifat-sifat setan.

***Misi.*** Misi PII adalah mencerdaskan kehidupan umat, bangsa, dan negara baik kehidupan individu maupun kehidupan nasional. Dewasa ini sudah banyak individu yang cerdas, menyandang berbagai gelar keserjanaan "Prof", "DR", "IR", dan sebagainya, bahkan juga menyandang gelar keagamaan yang hebat-hebat seperti "Ulama", "KH", "Pendeta", "Pedande", dan sebagainya. Tetapi kehidupn nasional yang belum cerdas. KKN, mementingkan diri sendiri dan berorientasi materialistis, berjangka pendek dan sebagainya.

**Tujuan.** PII dewasa ini seperti disebutkan di muka dalam keadaan “hanyut berat” ke dalam Sistem Pendidikan Nasional, sehingga terganjal untuk mengembangkan jati dirinya. Tujuan PII adalah untuk memberantas kebodohan umat Islam Indonesia dalam rangka menyukseskan tujuan Pendidikan nasional. PII ingin menghasilkan alumni-alumni “*clock Builders*” yaitu warga negara yang mampu membangun sejarah kehidupan bangsa Indonesia modern, dan tidak ingin menghasilkan alumni-alumni “*time teller*”, yaitu warga negara yang hanya mampu menghasilkan “tukang cerita” yang hanya dapat mengagumkan keberhasilan masa lalu tanpa mampu memanfaatkannya untuk membangun masa depan umat dan bangsa.

**Orientasi.** PII berorientasi pada *mutu* pendidikan. Meskipun demikian disadari sepenuhnya bahwa *perataan* pendidikan di kalangan umat merupakan “ganjalan” yang besar untuk diatasinya. Jika PII tidak berorientasi pada mutu, maka PII tidak mungkin mengatasi masalah tidak meratanya pendidikan di kalangan umat Islam Indonesia, hanya PII bermutulah yang dapat mengatasi problema perataan tersebut.

**Strategi.** strategi PII dalam mencapai tujuannya adalah dengan menggunakan *strategis efektif* dan *produktif*. Untuk itu, maka PII lebih suka mengedepankan atau mendahulukan pendekatan *nonformal* dan kebenaran *substantif* atau materi daripada pendekatan *legal-formal*; lebih suka mengedepankan pendekatan *strategis* daripada pendekatan organisatoris. Lihat ilustrasi pendekatan pada halaman di muka.

Seiring dengan “orientasi” dan “strategis” tersebut, PII secara mendasar ingin mengembangkan dan mengamalkan sains dan teknologi dalam bimbingan Wahyu. (Lihat analisa Internal di muka).

## Kedua. *Alokasi Sumber-Sumber Kekuatan PII*

PII menyadari sepenuhnya bahwa umat Islam merupakan golongan mayoritas bangsa Indonesia. oleh karena itu tidak sewajarnya jika PII membiarkan umat menjadi beban nasional. Sebaliknya, PII merencanakan dengan kuat untuk menjungkir-balikkan hal ini “dari umat yang dibangun, menjadi umat yang membangun bangsa dan negara ini”.

Sesungguhnya, potensi kekayaan umat dan negara ini sangat besar, hanya karena krisis *moral* dan krisis *kepercayaan* yang menyebabkan Pendidikan Islam Indonesia (PII) ini tidak bermutu.

Berikut, kami kutipkan penggalan puisi karya Nasruddin Ansory CH, dalam "Doa Anak Negeri".

"Tuhan, maafkan kami jika tiba-tiba kami mati rasa atas segala rahmat dan karunia-Mu. Ternyata bukan hanya gunung atau sawah dan hutan belantara yang Engkau berikan kepada kami. Betapa takjub dan terkejut kami, ribuan pulau dan hamparan lautan indah membentang di depan kami. Tetapi kami tetap saja miskin dan sempit wawasan tentang betapa kaya raya Indonesia ini" (Kompas, 08 Agustus 2006).

### Ketiga. *Kepemimpinan*

Bahwa kepemimpinan merupakan unsur kunci dalam mensukseskan PII sudah amat jelas. Dalam kesempatan yang amat terbatas ini kami ingin menekankan pada perilaku pemimpin yang "amanah", "tanggungjawab", "cerdas", dan "profesional" dalam mengelola PII. Ada dua besaran tugas dan tanggungjawab pemimpin PII. *Pertama*, *Governance*, yaitu menge-

lola sistem PII terkait dengan posisinya sebagai Subsistem Pendidikan Nasional, agar tidak tenggelam dan tidak hanyut sehingga lupa akan jati dirinya, serta keterkaitannya dengan lembaga-lembaga pemerintahan, khususnya dengan lembaga-lembaga akademik, baik nasional maupun internasional.

Pemimpin Mempunyai posisi dan peran yang amat menentukan kebesaran PII sebagai Subsistem Pendidikan Nasional; jangan menjadikan sekolah-sekolah madrasah dan pesantren sebagai sumber masalah rendahnya mutu PII. Bagaimana keberdayaan sekolah-sekolah Islam Indonesia, sangat tergantung pada bagaimana kualitas pemimpinnya, "*like leader, like people*", bagaimana kualitas "akar rumput" tergantung bagaimana kualitas pemimpinnya. "*Credo*" tradisi atau budaya kerja orang Jawab Barat mengatakan, "kalau membangun rumah harus dari bawah, tapi kalau ingin membersihkan rumah harus dari atas. (*Prinsip membangun Bottom up*)

*Kedua*, *Management*, yaitu mengelola perguruan atau sekolah, agar perguruan-perguruan Islam menjadi "*leading schools*", berdiri paling depan dalam perjalanan sekolah-sekolah di Indonesia ini.

#### Keempat. Evaluasi dan Akreditasi

Lembaga pendidikan dan perguruan Islam Indonesia, perlu melakukan *evaluasi* (penilaian ke dalam) sehingga sedini mungkin dapat dideteksi kelemahan dan kekuatan PII di segala aspeknya demi perjalanan ke depan, dan melakukan *akreditasi* (penilaian ke luar) sehingga secara terbuka *stake holders* dan pengguna jasa PII dapat mengetahui atau menilai seberapa jauh PII bermutu.

#### Kelima. *Benchmarking*

PII- perlu merumuskan standar mutu dari periode ke periode yang semakin tinggi atau hebat. "*benchmarking*" adalah "patok mutu" yang menjadi sasaran atau target yang harus dicapai dalam setiap aspek-aspek pendidikannya.

#### Keenam. *Kurikulum dan Tawaran Program-program Studi*

Kurikulum harus selalu ditinjau ulang sesuai dengan kemajuan dan tantangan zamannya. Kebutuhan kebutuhan program studi dalam jaman globalisasi ini berkembang dengan sangat cepat dan beragam.

Kebutuhan untuk selalu *mencang-gihkan* atau memperbaharui pemikiran Islam terasa semakin mendesak, demikian menghebat yang harus diantisipasi dan direspon oleh PII.

#### Ketujuh. *Pelayanan terhadap sivitas akademika dan tenaga pendukungnya.*

Sivitas akademika yaitu Dosen/guru dan mahasiswa merupakan pelaku utama dalam belajar dan mengajar dalam pendidikan. Oleh karena itu mereka perlu memperoleh pelayanan yang cepat dan meng-gairahkan proses belajar-mengajar, baik pelayanan akademik maupun non akademik. Kecuali itu, PII harus mampu mengembangkan "*Academic atmosphere*", lingkungan akademik yang mendorong sivitas akademika *betah* belajar di kampus, dan para karyawannya juga senang bekerja di kampus. Karyawan juga perlu di-dorong untuk merasa diri ikut serta memiliki perguruan, bukan hanya memandang sekolah sebagai tempat bekerja mencari penghasilan, tetapi sebagai tempat mengabdikan mencerdaskan generasi muda.

### Kedelapan. *Penelitian*

Berbeda dengan menyelenggarakan sebuah perusahaan atau pabrik-pabrik atau pun kantor-kantor pelayanan umum dan jasa, yang mengedepankan kualitas *produk final*, yaitu menghasilkan barang-barang yang baik, bermutu, dan terjangkau oleh daya beli pelanggan. Maka dalam pendidikan mengedepankan *produk proses*, yaitu alumni-alumni yang mampu berpikir kreatif, inisiatif, dan inovatif, serta cekatan dan tahan menghadapi tantangan yang menghadangnya sehingga mereka mampu hidup mandiri, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi demi membangun kehidupan bersama.

Untuk itu sejak awal pelajar sudah dididik, dilatih, dan dibiasakan *belajar meneliti*, belajar *bertanya* kritis, bukan sekadar mengikuti *jawaban* baku dan mengulang pelajaran lalu.

### Kesembilan.

PII perlu memonitor dan menilai alumnninya sesuai mereka menamatkan jenjang perguruan tertentu yaitu sekolah dan karir selanjutnya. Yang amat penting dari padanya adalah menilai dan memonitor kontribusi mereka

seberapa besar mereka ikut serta membesarkan dan menjaga nama baik almamaternya sesuai sekolah.

### Kesepuluh. *Lain-lain*

PII *harus tidak* hanya puas menyandang gelar “baik” atau “good”, dan puas dengan keuntungan, kehebatan demi kehebatan, tetapi PII harus selalu mengarahkan “mutunya” mencapai “kebesaran dan keharuman nama”, “Great” dan membawa maslahat untuk semuanya. Islam *rahmatan lil alamin*

Oleh karena itu PII perlu mengembangkan cabang-cabang baru, perluasan pembelajaran, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Juga mengembangkan kerjasama jaringan keilmuan dengan lembaga-lembaga di luar lingkarannya.

Sampai dewasa ini lebih banyak anak-anak muslim yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh atas nama non muslim daripada sebaliknya, yaitu anak-anak dari keluarga non muslim yang belajar di perguruan-perguruan Islam. Perguruan-perguruan Islam masih terasa *eksklusif* dan belum *inklusif*.

Analisa Internal dan Eksternal di atas dapat terus kita rentangkan panjangkan sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Boleh jadi ada satu dua butir analisa yang kurang benar, namun hal itu tidak akan mengurangi pentingnya kita meninjau ulang posisi dan peran pendidikan Islam Indonesia lengkap dengan sekolah-sekolahnya sebagai subsistem Pendidikan Nasional agar “tidak menjadi beban”, dan sebaliknya agar mampu ikut serta membesarkan Pendidikan Nasional secara signifikan, sekaligus membesarkan jati dirinya. Para sarjana dan cendekiawan muslim Indonesia perlu segera duduk bersama merumuskan “sistem Pendidikan Islam Indonesia sebagai Subsistem Pendidikan Nasional, dalam menatap tantangan jamannya –globalisasi di abad 21.

**Posisi dan Peran Pendidikan Islam Indonesia (PII)** sebagai subsistem pendidikan nasional harus kuat dan mampu mengembangkan jati dirinya agar dapat membantu membangun keberhasilan pendidikan Nasional. Makin cepat PII mampu mengembangkan dirinya, makin baik PII memberikan kontribusinya pada Pendidikan Nasional.

Analoginya, persis seperti sistem keluarga rumah tangga dalam Islam. “Keluarga sebagai satu sistem. Anak merupakan subsistem dari keluarga. Makin cepat anak dewasa dan mandiri, makin baik bagi keluarga yang bersangkutan. Sebaliknya makin lama anak tidak mampu hidup mandiri, makin ia menjadi beban keluarga, makin hebat keberhasilan anak berumah tangga di luar lingkaran keluarga, makin besar sumbangannya untuk membesarkan dan mengharumkan nama keluarga yang bersangkutan. Sekaligus juga mengharumkan nama keluarganya sendiri. Tetapi jika kemandirian anak gagal dan mendapat nama buruk di masyarakat, orang tua tidak akan ikut serta memperoleh nama buruk, karena anak sudah dewasa maka baik buruknya sudah dinilai oleh sistem kehidupan masyarakat. jadi kalau anak hidup sukses akan berdampak *manis* baik bagi keluarga orang tuanya dan sekaligus bagi keluarganya sendiri. Sebaliknya jika gagal, dampaknya berpulang pada keluarganya sendiri, dan tidak memperngaruhi keluarga orang tuanya.”

Demikian semoga bermanfaat.

*Wallahu 'Allam*

## SUMBER BACAAN

- Collins, Jim, *Good to Great, Harpers Colins Publisher Inc*, NY. USA, 2001.
- Kim, W. Chan, dan Mauborgne, Rence, *Blue Ocean Strategy*, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana, 1999.
- ., *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, INIS, Jakarta, 1994.
- ., *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, Yogyakarta: MSI dan Safira Indonesia Press, 2003.
- Maxwell, John C., *Developing the Leader Within You*, Library of Congress Cataloging-In Publication Data, USA., 1993.
- Middle States Commision on Higher Education, *Characteristics of Excellence in Higher Education. Eligibility Requirements and Standards for Accreditation*, 2002, USA.
- M. Quraish Shihab, *Dia Dimana-mana, "Tangan" Tuhan di Balik Setiap Fenomena*, 2004, Lentera Hati, Jakarta.
- Nata, Abuddin, *Tokoh-tokoh Pendidikan Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2005.